



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **JAUHARI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM**
3. NHK : **468352**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.095.000.000**

1. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 87.500.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 87.500.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
5. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 217.500.000
6. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 247.500.000
7. Tanah Seluas 977 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
8. Tanah Seluas 754 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 119.350.000**

1. MOBIL, Rush Mini Bus Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, Revo Bebek Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, Jupiter Bebek Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.



2.850.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	140.195.061
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.369.545.061
III. HUTANG	Rp.	320.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.049.545.061

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.